

TAJUK RENCANA

Revitalisasi Lumbung Mataraman

UPAYA percepatan dan penguatan pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan dan kemandirian pangan terus dilakukan oleh Pemda DIY. Teranyar, Sri Sultan kembali menegaskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dengan Revitalisasi Lumbung Mataraman

Sesuai Instruksi Fubernur DIY Nomor 5504 Thun 2026 tentang Revitalisasi Lumbung Mataraman melalui Optimalisasi Program Kalurahan Mandiri Panganuntuk Ketahanan Pangan DIY. Empat kalurahan tersebut terdiri Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprpgo), dan Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman.

Menurut Sri Sultan, revitalisasi Program Lumbung Mataraman menjadi langkah Pemda DIY untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, membangun kkemandirian pangan, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan.

Empat Hal itu diungkapkan gubernur usai Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan, Kamis (30/7) lalu.

Disebutkan, keberhasilan Lumbung Mataraman tidak hanya diukur dari hasil produksi pangan, tetapi juga dari kemampuannya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Karena hasil usaha yang diperoleh,perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menyisihkan sebagian keuntungan sebagai modal bersama untuk mengembangkan usaha.

Sultan berharap hasil penjualan produk Lumbung Mataraman mampu memberikan keuntungan yang tidak hanya dinikmati masyarakat, tetapi juga menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha pada musim berikutnya.

Penjualannya juga menguntungkan, jangan rugi. Nanti di situ kan ada keuntungan. Keuntungan ada yang bisa dibagi kepada masyarakat. Tapi dibikin

sisa. Sisa ditabung atas nama siapa, sesuai kesepakatannya. Sehingga akhirnya punya modal yang mungkin nanti bisa menyewa sendiri. Lebih dari satu hektare, kan begitu. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan itu ada,” papar Gubernur DIY.

Pola tersebut diyakini akan mendorong kelompok pengelola menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah setiap tahun.

Diingatkan pula, bantuan pemerintah harus menjadi pemicu tumbuhnya usaha produktif yang dapat terus berkembang melalui pengelolaan modal secara kolektif.

Melalui revitalisasi Program Lumbung Mataraman, Pemda DIY juga mengintegrasikan peran pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pemerintah teknis untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, empat kalurahan percontohan tersebut juga diharapkan menjadi model pengembangan yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam memperkuat ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan kemiskinan.

Diksi lumbung yang dilontarkan Gubernur DIY, mestinya diapresiasi oleh berbagai pihak yang berkompeten dengan pembangunan bidang pertanian. Apalagi kata lumbung sudah terpatril dalam masyarakat dalam benak masyarakat tani di Indonesia, Jawa khususnya. Bahkan selama puluhan tahun masyarakat tani sudah mengmplementasikan lumbung dalam budaya pertanian.

Sesuai Kamus Bahasa Indonesia, lumbung berarti tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi. Bahkan masyarakat tani saat itu sudah mengenal sebutan lumbung pangan dan lumbung desa. Lumbung pangan padi atau bahan pangan untuk menghadapi masa paceklik.

Mengingat lumbung pangan dan lumbung desa sangat penting untuk masyarakat pertanian, apakah pemerintah juga dapat memahaminya? Jangan sampai pemerintah tidak dapat mengimplementasikannya dalam perencanaan pembangunan. □ - f

KETIKA SANG PILAR KEEMPAT DITERPA BADAI HINAAN

Menjaga Harga Diri Pers



BELAKANGAN ini publik disuguhkan oleh serangkaian narasi dan stigma negatif yang dialamatkan kepada para insan pers. Mulai dari label ”Londo Ireng” yang dilonarkan oleh Presiden Prabowo, umpatan ”punya otak gak!” dari pengacara kondang Hotman Paris, hingga julukan ”rombongan sirkus” oleh anggota DPR RI Deddy Sitorus di Gedung Parlemen. Fenomena ini seolah menempatkan wartawan pada titik nadir: dipandang sebelah mata, direndahkan, dan seakan kehilangan martabatnya di mata para pemangku kekuasaan.

Lantas, apakah kondisi ini menandakan bahwa pilar keempat demokrasi telah hancur dan runtuh? Dan bagaimana seharusnya wartawan menyikapi ujaran-ujaran tersebut? Untuk memahami sejauh mana posisi wartawan dalam masyarakat, kita perlu menengok kembali hakikat filsafat dan teori jurnalistik:

’Fourth Estate’ (Pilar Keempat Demokrasi)

Teori yang digagas oleh Edmund Burke pada akhir abad ke-18 ini menempatkan pers sejajar dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers bertugas sebagai *watchdog* (anjing pengawas) yang mengawasi jalannya kekuasaan agar tidak terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dalam perspektif ini, keberadaan pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan institusi demokrasi yang mewakili kepentingan publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Semakin kuat fungsi kontrol yang dijalankan media, semakin sehat pula kehidupan demokrasi karena setiap kebijakan dan penggunaan kekuasaan berada di bawah sorotan publik. Oleh karena itu, upaya mendiskreditkan wartawan pada hakikatnya bukan hanya menyerang individu atau profesi, tetapi juga berpotensi melemahkan salah satu mekanisme kontrol yang menjadi penyangga utama demokrasi.

Teori Tanggung Jawab Sosial

Di rumuskan oleh Hutchins Commission (1947), teori ini menekankan bahwa pers memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menyajikan berita se-

Chaidir

cara akurat, objektif, serta membela kepentingan publik di atas kepentingan elit politik atau pemilik modal.

Agenda Setting Theory

Disampaikan oleh McCombs & Shaw, teori ini menunjukkan betapa besarnya peran jurnalis dalam menentukan topik apa yang penting untuk dipikirkan oleh masyarakat. Kekuatan ini kerap membuat pihak-pihak yang merasa terganggu oleh kontrol



pers melontarkan resistensi berupa serangan verbal.

Apakah Pilar Keempat Telah Runtuh? Jawabannya: Belum runtuh, namun sedang mengalami krisis legitimasi dan tekanan yang sangat kuat. Serangan kata-kata kasar dari elite pejabat maupun publik figur sejatinya adalah bentuk resistensi kekuasaan terhadap fungsi kontrol pers. Ketika fungsi *watchdog* bekerja,menyingkap hal-hal yang ditutupi atau mengajukan pertanyaan kritisópihak yang merasa terpojok sering kali menggunakan strategi perendahan (*discrediting*) untuk mendelegitimasi kredibilitas wartawan.

Namun, di sisi lain, pers juga perlu berinterospeksi. Munculnya persepsi negatif tidak sepenuhnya datang dari luar; praktik jurnalisme clickbait, sensasionalisme demi traffic, serta sebagian kecenderungan berpihak pada kepentingan politik tertentu turut mengikis kepercayaan publik (public

trust) terhadap profesi ini.

Bagaimana Wartawan Harus Menghadapi Hinaan Ini?. Menghadapi cercaan dan anggapan rendah tidak bisa dibalas dengan emosi belaka, melainkan dengan keteguhan etik dan profesionalisme:

Menjawab dengan Karya dan Etika. Cara terbaik membungkam tuduhan bahwa pers adalah ”rombongan sirkus” atau tidak berotak adalah dengan menghasilkan karya jurnalistik yang mendalam (*investigative journalism*), objektif, dan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Organisasi profesi pers (seperti AJI, PWI, IJTI) beserta Dewan Pers harus bersatu memberikan advokasi hukum dan perlindungan terhadap kebebasan pers, serta melayangkan teguran resmi atas pernyataan peyoratif yang dilayangkan elit pejabat.

Memperkuat Kemandirian (Independensi)

Wartawan harus membuktikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan publik, bukan pesanan oligarki maupun elit politik tertentu. Kehormatan pers tidak ditentukan oleh seberapa ramah para pejabat memperlakukan jurnalis, melainkan seberapa teguh jurnalis berdiri menyuarkan kebenaran demi publik. Hinaan dan sebutan merendahkan

tidak akan pernah menghancurkan pilar keempat demokrasi selama pers tetap menjaga independensi, keakuratan, dan integritasnya. Pers mungkin sedang berdarah-darah, tetapi ia belum tumbang. (*)-f

*)Chaidir, Jurnalis di Yogya.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Sumur Kitiran Mas, Aset Wisata DIY?



SUMUR Kitiran Mas (SKM) merupakan tempat ziarah bagi umat Katolik yang terletak di sebuah gereja, yakni gereja Maria Assumpta Pakem, Kecamatan Pakem, Sleman. Dalam

waktu singkat, tempat ziarah gereja itu berkembang menjadi tempat ziarah nasional, bahkan internasional.

Dilihat dari luar memang tampak gereja biasa. Tempat ziarahnya berada di sayap utara altar gereja itu. Sumur Kitiran Mas persis berada di depan altar Bunda Maria. Sedang tempat doanya berada di timur sumur. Jika tempat doa penuh, bisa menggunakan ruang serba guna sebelah utara sumur.

Umat setempat menandai sumur yang ditemukan lewat pertolongan Banda Maria dengan nama Sumur Kitiran Mas. Dari sumur Kitiran Mas inilah para peziarah mengambil air, meminumnya dan mohon agar umat dapat merasakan air kehidupan yang berguna untuk hidup rohani maupun jasmani.

Keberadaan Sumur Kitiran Mas mempunyai sejarah yang panjang. Penyebaran agama Katolik di Pakem pertama kali dilakukan oleh Romo P Van Driesche, SJ dari 1922-1926. Romo tersebut mendapat bantuan Bapak Ignasius Suro Brotoatmaja dan Antonius Sandimin Martosudarmo dari dusun Pojok, Bapak Partodarsono dari dusun Dero. Sedangkan orang Katolik pertama di Pakem lainnya adalah Iskak Sastrowardoyo (Dero), Partodarsono (Dero), Ranupratomo (Paraksari), Projosampurno (Blembem Lor), Kertodijoyo (Mangunan) dan Sidik (Dero).

Penemuan sumur yang kemudian menjadi tempat ziarah itu merupakan puncak dari upaya dan ziarah yang panjang, yang penuh dengan pencari-

A Kardiyyat Wiharyanto

an dan pengharapan. Tanpa upaya yang panjang itu tak mungkin ada sumur di dalam gereja Pakem itu sebagai satu-satunya di Indonesia.

Jauh sebelum sumur digali, diadakan peziarahan mencari tujuh kembang dan tujuh mata air. Peziarahan itu dilakukan tengah malam. Tujuh kembang yang dicari adalah kembang melati, kemuning, tlasih, kelapa, kan-til, mawar dan temon. Peziarahan tujuh kembang itu dimaksudkan sebagai terakatan yang dipersembahkan untuk mengenang pada tujuh wanita desa yang telah memberikan teladan, kebijaksanaan, dan inspirasi hidup. Dalam diri ketujuh wanita itulah umat melihat dan merasakan secara nyata keprihatinan dan kesederhanaan Maria.

Ziarah tujuh kembang itu diteruskan dan dilengkapi dengan ziarah ketujuh sumber air, yang juga dilakukan di malam hari dipimpin Romo Sindunata SY. Ketujuh sumber yang diziarahi adalah tujuh sumber air yang dianggap keramat, angker dan suci di lereng Gunung Merapi, masing-masing adalah Tuk Celeng, Tuk Wengi, Tuk Sangkan Paran, Tuk Rembulan, Tuk Ulam, Tuk Cuwo, Tuk Macan. Pada masing-masing peziarahan itu, air dari masing-masing tuk (mata air) itu diambil dan dibawa pulang.

Peziarahan tujuh kembang dan tujuh mata air diadakan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun. Lalu peziarahan tersebut ditutup dengan novena pada Bunda Maria. Umat di stasiun berdoa kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria su-

di memberi air kehidupan dan menunjukkan di mana persisnya sumur harus digali. Umat merasa, sumur itu harus digali tepat di bawah kaki Bunda Maria. Karena kondisi tempatnya, maka luas sumur tersebut harus hanya seluas satu tegel.

Di sekitar Sumur Kitiran Mas ini ada batu-batuan, kodok, kupu-kupu, ikan kotes, buto bajang, yang semuanya dari batu Gunung Merapi. Benda-benda tersebut bukan sekadar hiasan tetapi memiliki pralambang yang penuh kenangan. Tiap-tiap pralambang itu mengingatkan peristiwa yang dahulu dialami selama peziarahan mencari air di lereng Gunung Merapi, yang mendahului penggalian sumur tersebut.

Bagaimanapun juga di samping sebagai tempat ziarah, Sumur Kitiran Mas sekaligus juga sebagai aset wisata yang sedikit banyak punya andil bagi pengalakan wisata di DIY umumnya atau Kabupaten Sleman khususnya. (*)-f

*)Drs A Kardiyyat Wiharyanto MM, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.

Pojok KR

Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemerintah mengeluarkan MBG dari anggaran pendidikan.

- Terus masuk mana?

Empat kalurahan di DIY menjadi model percontohan revitalisasi Lumbung Mataraman.

- Harus dicontoh.

Bupati Pemalang Jawa Tengah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Siapa menyusul?

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@krjogja.com, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaraga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank Mandiri - Rek: 1370025381365, Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.